



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**KURIKULUM DIKLAT
KEPEMIMPINAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
BAGI KALAKSA BPBD**

Kurikulum Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD
Edisi 1, 2018

Pengarah
Bagus Tjahjono
Hermana
Afrial Rosya

Penyusun
R. Theodora Eva YA
Apriyuanda Giant Bayu P
Ruswanto
Sri Hastuti
Jajat Suarjat
Alam Maulana
Sandy Permana
Valentinus Irawan
Pahrian Siregar

Diterbitkan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dicetak Oleh:
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: XXX-XXX-XXXXX-X-X

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau deenda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Indikasi ini berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana atau UN-ISDR (*The United Nations Office for Disaster Risk Reduction*). Tingginya tingkat kerawanan bencana tersebut berdasarkan perkiraan jumlah penduduknya yang berisiko kehilangan nyawa diakibatkan terjadinya bencana alam. Indonesia memiliki kerawanan yang tinggi disebabkan posisinya atau letaknya di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, yang kerap berlangsung tubrukan dan mengakibatkan gempa bumi dan aktifnya gunung berapi yang ada. Beberapa bencana yang sering mengancam Indonesia sangat berhubungan dengan kondisi di atas, diantaranya: tsunami, gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Selain itu, beberapa jenis bencana lainnya juga terjadi di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) paling tidak mencatat ada beberapa jenis bencana alam lain, diantaranya: banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Sejumlah kegiatan perlu dilakukan untuk pencegahan bencana, yang menjadi salah satu aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, selain kegiatan pada masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara khusus dalam pasal 34, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana terdiri dari dua situasi, yaitu tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana. Penjelasan mengenai berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dalam kedua situasi ini memiliki kesamaan, yaitu menyebutkan tentang penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu alternatif kegiatan mitigasi dan juga kegiatan pada daerah yang tidak terjadi bencana, yakni pada Pasal 18 dan Pasal 22.

Peningkatan kapasitas yang baik dari aparat di daerah, dengan koordinasi yang memadai dengan aparat di tingkat nasional adalah kunci bagi keberhasilan penanggulangan bencana di daerah. Untuk itu Pusdiklat PB BNPB merasa perlu untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi di daerah dalam penanggulangan bencana. Sasaran pelatihan ini dikhususkan bagi para pengambil keputusan dalam penanggulangan bencana. Harapannya, para pembuat kebijakan dan manajer ini memiliki kapasitas yang semakin baik dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan penanggulangan bencana di daerahnya.

B. Kerangka Dasar Kurikulum

1. Landasan Konseptual

Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang berpotensi menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di negeri ini.

Berdasarkan undang-undang tersebut, penanggulangan bencana bertujuan untuk : (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, dan (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sudah banyak studi ilmiah yang menegaskan betapa pentingnya investasi dalam bidang kebencanaan, agar dapat mengurangi potensi dampak dari bencana. Investasi ini tidak selalu berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan ketersediaan pendanaan, namun satu hal yang tak kalah penting adalah peningkatan kapasitas manusia Indonesia dalam menghadapi bencana. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana yang harus dilakukan tidak hanya pada para pelaku di tingkat nasional, namun juga para pelaku di daerah. Peningkatan kapasitas para pelaku di daerah dirasakan nilai pentingnya, sebab mereka yang sesungguhnya lebih memahami situasi kebencanaan dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

2. Landasan Empirik

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan dan terletak di antara benua Asia dan Australia di samping memiliki posisi strategis dalam jalur lalu-lintas perdagangan dunia juga memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Potensi bencana yang ada dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu bencana alam, non alam dan bencana sosial. Kejadian ketiga jenis bencana ini pada akhirnya berujung pada kerugian, baik terhadap harta benda, kerusakan fisik dan infrastruktur. Upaya meminimalisasi kerugian dapat dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang akan melakukan penanggulangan bencana, yang diantaranya dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pada para pelaku penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 huruf g dan bahwa pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dapat dilaksanakan pada situasi tidak terjadi bencana dan diuraikan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat (1) huruf g dan h bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana adalah pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Demikian pula pada pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,

kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan Pasal 14 Ayat (2) memuat implementasi pendidikan dan pelatihan berbentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

3. Landasan Yuridis

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pada BAB IV Pasal 5 memberi amanat bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang kemudian dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Sedangkan Pasal 31 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi; (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, (b) kelestarian lingkungan hidup, (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah, dimana dalam meliputi : prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pada pasal 18 dan 19, UU No. 24 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sedangkan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana adalah penitikberatan pada upaya-upaya yang bersifat pencegahan pada prabencana, kemudahan akses pada saat tanggap darurat, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada paska bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyatakan bahwa BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas: (a). menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; (b). menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; (c). menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; (d). menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; (e). melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; (f). mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; (g). mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan (h). melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan

1. Tujuan Kurikuler Umum

Setelah mengikuti Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD, peserta dapat:

- a) Meningkatkan pemahaman penanganan penanggulangan bencana secara menyeluruh
- b) Meningkatkan kemampuan strategis dalam penanggulangan bencana
- c) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana.

2. Tujuan Kurikuler Khusus

Setelah mengikuti Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD, peserta dapat:

- a) **memahami** konsep dan karakteristik bencana;
- b) memahami dan menyusun program dan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- c) memahami manajemen tanggap darurat bencana dan SKPDB;
- d) memahami dan menyusun strategi dan implementasi pasca bencana;
- e) memahami manajemen dan sistem logistik dan peralatan;
- f) **memahami** sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia;
- g) memahami prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam penanggulangan bencana;
- h) ~~memiliki kemampuan~~ melakukan kegiatan penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan;
- i) ~~memiliki kemampuan~~ melakukan **dalam**-koordinasi pada periode tanggap darurat;
- j) ~~memiliki kemampuan~~ melakukan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

D. Kompetensi Lulusan (Sosok Keluaran)

Kompetensi lulusan yang ingin dicapai dalam Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD ini adalah: , peserta dapat ~~memahami~~ melakukan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dan peran Kepala Pelaksana/ Sekretaris/ Kepala Bidang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

E. Pengertian

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdiklat PB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kebencanaan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Diklat PB adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana.
3. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah Pemerintah, pemerintah daerah/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana.
4. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan sesuai dengan tugas dan/atau fungsi dalam suatu jabatan.

5. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak, yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala kompleksitasnya.
7. Jenjang Operator adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dan pengetahuan operasional di bidang penanggulangan bencana sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan metoda yang sesuai, kerja sama dalam lingkup kerjanya, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri serta dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
8. Jenjang Teknis/Analisis adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam mengaplikasikan bidang keahliannya, mampu menyelesaikan masalah, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, memiliki konsep teoritis bidang penanggulangan bencana secara umum dan dalam bidang pengetahuannya secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, mempunyai tanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja organisasi.
9. Jenjang Ahli adalah jenjang jabatan yang memerlukan kecakapan dalam merencanakan sumber daya di bidang penanggulangan bencana di bawah tanggung jawabnya, mengevaluasi secara komprehensif kerjanya, memecahkan masalah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah strategis organisasi dan melakukan riset, penelitian, dan pengembangan, dan dapat mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

BAB II

STRUKTUR KURIKULUM DIKLAT KEPEMIMPINAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

A. Prinsip Kurikulum Diklat Berbasis Kompetensi

Kurikulum ini mendukung pencapaian kompetensi dalam lingkup peningkatan kapasitas peserta dari unsur pemerintah, khususnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, agar tanggap, tangkas dan tangguh dalam mendukung penanggulangan bencana khususnya di bidang dasar manajemen penanggulangan bencana, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Secara teknis, pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai kompetensi yang ditentukan dengan analisis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta pelatihan.

Adapun ciri-ciri rancangan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah:

1. menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta pelatihan sebagai keluaran proses pembelajaran;
2. materi ajar dan proses pembelajaran serta cara penilaian didesain dengan orientasi pada pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan untuk profesi tersebut;
3. lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif;
4. proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif secara prosedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar;
5. disusun oleh penyelenggara diklat dan pihak-pihak berkepentingan terhadap jaminan mutu kompetensi pelaku;
6. Menyediakan peta pikiran yang jelas dalam hal proses pembelajaran mutu.

B. Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana

Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana adalah diklat yang memberikan pemahaman yang utuh bagi para peserta diklat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Diklat Senior Management Training Penanggulangan Bencana akan memberikan pemahaman mendasar mengenai kebencanaan dan dasar-dasar penanggulangan bencana termasuk di dalamnya membahas mengenai konsep dan karakteristik bencana, pengurangan risiko bencana, manajemen tanggap darurat bencana, manajemen pemulihan bencana, manajemen logistik dan peralatan, serta beberapa hal khusus yang harus dimiliki pengambil kebijakan di dalam penanggulangan bencana. Hal lain yang juga akan diperoleh peserta Senior Management Training Penanggulangan Bencana adalah mengenai sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia, penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan, koordinasi pada periode tanggap darurat, prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam penanggulangan bencana, serta pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

C. Program Diklat Dasar Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana

STRUKTUR KURIKULUM DIKLAT	WAKTU	JUMLAH
KELOMPOK MATA DIKLAT		
1. Pembukaan dan Penutupan		2 JP
2. Dinamika kelompok		2 JP
3. Rencana Tindak Lanjut		4 JP
4. Pre dan Post Test		2 JP
PEMAHAMAN PENANGGULANGAN BENCANA:		13 JP
1. Kebencanaan	3 JP	
2. Program dan kebijakan pengurangan risiko bencana	3 JP	
3. Penanganan darurat bencana	2 JP	
4. Strategi dan implementasi pemulihan bencana	3 JP	
5. Sistem logistik dan peralatan nasional	2 JP	
PENINGKATAN KEMAMPUAN STRATEGIS		8 JP
1. Sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia	3 JP	
2. Penanggulangan bencana sebagai prioritas pembangunan	3 JP	
3. Koordinasi pada periode tanggap darurat	4 JP	
PENINGKATAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN		7 JP
1. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana	3 JP	
2. Simulasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan	4 JP	
TOTAL		40 JP

D. Silabus Mata Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana

1. MATA DIKLAT DINAMIKA KELOMPOK

a) Deskripsi Singkat

Peserta diajak untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim. Peserta diarahkan untuk saling mengenal dan membuat peserta merasa dirinya slap dan nyaman dengan suasana pelatihan melalui permainan. Selanjutnya dijelaskan tujuan, pendekatan, dan struktur pelatihan sehingga peserta memahami gambar besar pelatihan ini. Aktivitas selanjutnya adalah memetakan harapan, kekuatiran, dan kontribusi fasilitator dan peserta. Setelah itu peserta diajak membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mendukung keberhasilan pelatihan.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Melakukan interaksi dengan peserta lain.
- 2) Melakukan kerjasama dengan peserta lain sebagai sebuah tim.

d) Materi Pokok

- 1) Penciptaan dinamika kelompok
- 2) Penjelasan deskripsi ringkas pelatihan dan fasilitas yang ada di tempat pelatihan
- 3) Kesepakatan aturan-aturan dalam pelatihan

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Panduan penyelenggaraan Diklat

f) Jumlah JP: 2 JPL (90 menit)

2. MATA DIKLAT KEBENCANAAN

a) Deskripsi Singkat

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jika kita mencermati, maka kita mendapati tiga komponen dalam pengertian-pengertian di atas, yaitu bencana, kejadian mengancam (bisa alam maupun non alam), dan faktor manusia. Implikasinya adalah bencana dan kejadian ancaman (selanjutnya disebut ancaman) merupakan dua hal yang berbeda, ancaman dapat menjadi bencana apabila manusia dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan menghadapi ancaman atau kerentanan terhadap bencana. Setiap jenis bencana mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diakibatkannya dimana penetapannya ditentukan oleh komponen penyebab bencana itu sendiri dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Secara keseluruhan karakteristik bencana di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geologis, posisi astronomis, dan perilaku manusianya yang menghasilkan berbagai bencana, yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai/pasang, gempa bumi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit.

Manajemen penanggulangan bencana merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra, tanggap, dan paska bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses

tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana. Manajemen penanggulangan bencana meliputi: manajemen risiko bencana, manajemen darurat dan manajemen pemulihan.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan konsep bencana.
- 2) Membedakan jenis-jenis bencana.
- 3) Menjelaskan karakteristik bencana.
- 4) Menjelaskan lingkup manajemen penanggulangan bencana.

d) Materi Pokok

- 1) Konsep Bencana
- 2) Jenis dan Karakteristik Bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) UU Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan

f) Jumlah JP: 3 JP (135 menit)

3. MATA DIKLAT PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

a) Deskripsi Singkat

Manajemen risiko bencana membahas mengenai pemahaman yang komprehensif terhadap risiko bencana, yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi kerugian akibat bencana. Dalam manajemen risiko diperlukan langkah penanganan yang menyeluruh dan efektif, di mana semua elemen masyarakat wajib berperan serta untuk bersama-sama mengaplikasikan manajemen risiko dalam penanggulangan bencana dengan mengedepankan pendekatan pencegahan dan mitigasi dan bukan berbasis tanggap darurat. Manajemen risiko bencana terfokus pada pengurangan risiko bencana, yang bermakna: Mampu mencegah munculnya ancaman, jika memungkinkan. Jika tidak, mampu mengurangi besarnya atau kekuatan ancaman. Jika ancaman datang, mampu mengurangi dampak bencana yang terjadi dengan mempersiapkan masyarakat. Jika bencana terjadi, mampu menanggulangi secara efektif. Setelah bencana ditanggulangi, mampu pulih secara cepat dan siap terhadap kemungkinan bencana di masa depan.

Kegiatan kesiapsiagaan merupakan langkah penting dalam Manajemen penanggulangan bencana, karena pada kenyataannya tidak semua bahaya dapat dicegah ataupun ditangani dengan aktivitas mitigasi yang komprehensif. Untuk menghindari kerugian lebih besar yang diakibatkan sebuah bencana, khususnya hilangnya nyawa, maka diperlukan upaya yang jelas dan

terencana. Kegiatan kesiapsiagaan itu juga berfungsi sebagai rencana cadangan (kontinjensi/contingency plan) bila akhirnya sebuah ancaman bahaya benar-benar menjadi nyata. Rencana Kesiapsiagaan dibuat bukan pada saat bahaya muncul tetapi saat sebelum ancaman bencana terjadi. Rencana tersebut lebih merupakan tindakan antisipatif jika suatu saat ancaman bahaya benar-benar muncul. Rencana tersebut merefleksikan sikap kita yang siap (*prepared*) terhadap ancaman bahaya yang akan datang, maupun juga sikap yang siaga (*ready*) bila saatnya nanti ancaman bahaya menjadi kenyataan.

Di dalam pengurangan risiko bencana, paradigma yang dikembangkan adalah memandang bencana bukan semata sebagai kejadian tiba-tiba, tapi erat kaitannya dengan proses panjang yang berhubungan dengan tindakan manusia, dimana menempatkan masyarakat adalah subyek dan bukan lagi hanya sebatas obyek dari penanggulangan bencana. Sehingga program dan kebijakan harus mempertimbangkan pepaduan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan faktor-faktor sosial ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan dampak bencana.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami dan menyusun program dan kebijakan pengurangan risiko bencana dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen risiko bencana.
- 2) Menjelaskan manajemen kesiapsiagaan.
- 3) Memahami dan menyusun program dan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana.

d) Materi Pokok

- 1) Manajemen Risiko Bencana
- 2) Manajemen Kesiapsiagaan
- 3) Program dan kebijakan pengurangan risiko bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- 3) Perka BNPB No. 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- 4) Amri, M.R., *et al.*, (2016) Risiko Bencana Indonesia. BNPB

f) Jumlah JP: 3 JP (135 menit)

4. MATA DIKLAT PENANGANAN DARURAT BENCANA

a) Deskripsi Singkat

Manajemen darurat adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana, dengan fase siaga darurat, tanggap darurat,

dan pemulihan darurat. Tanggap darurat umumnya berkisar dari menyediakan bantuan spesifik namun terbatas seperti membantu evakuasi dan transportasi para pengungsi, hunian darurat, makanan, dan perbaikan awal terhadap infrastruktur yang rusak. Fokus tanggap darurat adalah menangani dampak negatif dari kejadian bencana khususnya memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi korban hingga solusi yang lebih permanen dan menyeluruh dapat diberikan pada tahap bantuan berikutnya. Secara umum manajemen darurat bencana akan meliputi kegiatan-kegiatan berikut: (1) siaga darurat, (2) pengkajian cepat, (3) penentuan status kedaruratan, (4) *search and rescue* (SAR), (5) pencarian, penyelamatan dan evakuasi (PPE), (6) respon and bantuan (*response and relief*), serta (6) pengkajian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama masa tanggap darurat bencana, diantaranya: penyediaan logistik dan suplai, manajemen informasi dan komunikasi, ketepatan respon dan memampukan korban, serta penciptaan keamanan.

Penangan darurat bencana dilakukan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), yang merupakan suatu standar penanganan darurat bencana yg digunakan dengan mengintegrasikan pengerahan fasilitas, peralatan, personil, prosedur dan komunikasi di dalam sebuah struktur organisasi. Aktivasi sistem komando ini harus didasarkan pada diberlakukannya penetapan status keadaan darurat bencana hingga status keadaan darurat dinyatakan selesai. Di dalam pelaksanaan sistem komando ini, hanya diperbolehkan satu sistem komando ini saja yang berlaku, dimana seluruh unsur pihak yang terlibat harus berada di bawah koordinasinya.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami manajemen tanggap darurat bencana dan SKPDB dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen darurat bencana.
- 2) Menjelaskan lingkup dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam masa tanggap darurat bencana
- 3) Memahami tahapan, struktur dan operasionalisasi SKPDB dalam penanganan tanggap darurat bencana.

d) Materi Pokok

- 1) Manajemen Darurat Bencana
- 2) Lingkup dan Hal-hal Penting dalam Masa Tanggap Darurat Bencana
- 3) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- 3) Perka BNPB No. 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Santunan Duka Cita
- 4) Perka BNPB No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan
- 5) Perka BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana

f) Jumlah JP: 2 JP (90 menit)

5. MATA STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PEMULIHAN BENCANA

a) Deskripsi Singkat

Manajemen pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fase yaitu: rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam manajemen pemulihan darurat berupa kegiatan pengkajian dan penilaian kebutuhan pascabencana. Pengkajian dan penilaian kebutuhan pasca bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam sebuah kejadian bencana, strategi dan implementasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar, yang meliputi: merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah, membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana, mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat, mengoptimalkan sumberdaya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, serta engedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami dan menyusun strategi dan implementasi pasca bencana dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen pemulihan bencana.
- 2) Memahami konsepsi dasar mengenai kajian kebutuhan pasca bencana
- 3) Memahami dan menyusun strategi dan implementasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

d) Materi Pokok

- 1) Manajemen Pemulihan Bencana
- 2) Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
- 3) Strategi dan implementasi kegiatan Pasca Bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

f) Jumlah JP: 3 JP (90 menit)

6. MATA DIKLAT SISTEM LOGISTIK DAN PERALATAN NASIONAL

a) Deskripsi Singkat

Amanah dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa BNPB mempunyai tugas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan. Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, merupakan suatu sistem yang menjelaskan tentang logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana pada masa pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana adalah: kemampuan infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi penanggulangan bencana baik secara nasional, regional, lokal maupun setempat.

Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi. Sumber logistik bersumber dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Jenis logistik, meliputi logistik kemanusiaan, minter, dan komersial. Logistik kemanusiaan untuk menyelamatkan penyintas dan harus sesuai dengan kebutuhan dilapangan, efisien dan hemat biaya. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Dalam pengaturan logistik nasional bencana, perlu diperhatikan empat indikator pemilihan cara logistik yang digunakan, diantaranya: cakupan yang diharapkan (*appeal coverage*), waktu penyerahan hingga penyampaian (*donation-to-delivery time*), efisiensi keuangan (*financial efficiency*) dan akurasi penilaian (*assessment accuracy*)

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami manajemen dan sistem logistik dan peralatan dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Menjelaskan manajemen logistik.
- 2) Menjelaskan manajemen peralatan.
- 3) Memahami sistem logistik bencana nasional

d) Materi Pokok

- 1) Manajemen Logistik
- 2) Manajemen Peralatan
- 3) Sistem logistik nasional

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

- 3) Perka BNPB No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitorang dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana

f) Jumlah JP: 4 JP (180 menit)

7. MATA DIKLAT SISTEM NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA INDONESIA

a) Deskripsi Singkat

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Ketersediaan payung hukum ini telah merubah pendekatan penanggulangan bencana yang bertumpu pada pendekatan responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsagaan. UU ini memandatkan pentingnya negara melakukan perlindungan kepada rakyat dari risiko bencana. Untuk itu, penanggulangan bencana harus terintegrasi dalam rencana pembangunan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, serta dibutuhkan kelembagaan yang kuat dan semesta, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai tulang punggung pelaksanaannya.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami sistem nasional dan kerangka regulasi yang berlaku, serta kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Memahami sistem nasional dan kerangka regulasi yang berlaku saat ini dalam penanggulangan bencana
- 2) Memahami kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana.

d) Materi Pokok

- 1) Sistem Nasional dan Kerangka Regulasi Penanggulangan Bencana
- 2) Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) UU Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan

f) Jumlah JP: 3 JP (135 menit)

8. MATA DIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN

a) Deskripsi Singkat

Saat ini, masyarakat dunia memiliki beberapa agenda bersama, diantaranya: tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) perjanjian paris tentang perubahan iklim (paris agreement on climate change), serta kerangka sendai untuk pengurangan risiko bencana (sendai framework for disaster risk reduction). Penanggulangan bencana menjadi sangat penting dikedepankan, jika kita hendak mengupayakan pemenuhan agenda-agenda global tersebut.

Pemaduan penanggulangan bencana, utamanya menurunkan risiko bencana, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang adalah sangat strategis. Hal ini untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dijamin dan didukung oleh keuangan negara dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang dibuat secara terpadu dan lintas sektor oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini sebaiknya berdasarkan Kajian Risiko Bencana, yang disusun dengan data dan analisis yang akurat tentang ancaman bencana, kerentanan dan kemampuan tentang daerah yang bersangkutan.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami agenda global terkait dengan penanggulangan bencana, cara-cara memadukan dan mengimplementasikan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Memahami penanggulangan bencana dan pemenuhan agenda global
- 2) Memahami pemaduan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional
- 3) Memahami implementasi rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah

d) Materi Pokok

- 1) Penanggulangan Bencana dan Pemenuhan Agenda Global
- 2) Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

f) Jumlah JP: 3 JP (135 menit)

9. MATA DIKLAT KOORDINASI PADA PERIODE TANGGAP DARURAT

a) Deskripsi Singkat

Di dalam kejadian bencana, terutama pada masa tanggap darurat, sering kali pemerintah terkesan lambat, bingung, gagap dan putus asa. Para pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan terkesa berjalan sendiri-sendiri, sesuai dengan yang diinginkan dan tugas pokok dan fungsi kesehariannya. Hal ini terkadang diperparah dengan munculnya komentar dan berita simpang siur tanpa kendali, yang semakin mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Keadaan ini akhirnya cenderung mengakibatkan para pihak saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.

Peran BNPB dan BPBD dapat meliputi koordinasi, komando dan pelaksana di dalam penanggulangan bencana. Namun dalam kondisi tanggap darurat, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Tugas BNPB dan BPBD adalah memfasilitasi terbentuknya, berjalannya dan pelaporan dari pos komando tersebut. Pos komando tanggap darurat bencana dapat dilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana, yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami dan melakukan koordinasi, komando dan pelaksana dalam tanggap darurat, serta sistem komando penanganan darurat bencana dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Memahami pentingnya koordinasi, komando dan pelaksana dalam tanggap darurat
- 2) Memahami sistem komando penanganan darurat bencana

d) Materi Pokok

- 1) Koordinasi, Komando dan Pelaksana
- 2) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan
- 2) Perka BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

f) Jumlah JP: 4 JP (180 menit)

10. MATA DIKLAT PRINSIP-PRINSIP DASAR KEPEMIMPINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

a) Deskripsi Singkat

Faktor kepemimpinan menjadi sebuah faktor penentu pada sebuah penanganan kebencanaan yang baik. Ciri, karakter dan gaya kepemimpinan sangat beragam, namun penilaian keberhasilan kepemimpinan seseorang dalam penanggulangan bencana didasarkan pada kemampuannya meminimalisasi atau menghilangkan kemungkinan korban yang ditimbulkan dari kejadian bencana. Pemaknaan kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mengarahkan orang lain/ kelompok orang untuk mengikutinya atau melakukan apa yang dimintanya secara sukarela. Pemaknaan ini dapat menjadi refleksi bagi seorang pemimpin apakah kepemimpinannya sudah memadai ataupun belum.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan banyak cara, baik secara demokratis hingga ditentukan oleh satu orang di dalam kelompok, yang sangat tergantung pada dinamika di dalam kelompok tersebut. Terkadang di dalam suatu pengambilan dapat saja terjadi perbedaan pendapat, dan mekanisme penyelesaian pendapat dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya: melalui voting, melalui musyawarah dan mufakat, melalui penilaian atas suatu kriteria, dsbnya. Jika bekerja dalam sebuah kelompok, untuk menghindari konflik yang tidak produktif, sebaiknya ditentukan mekanisme pengambilan keputusan yang akan diterapkan sedini mungkin.

b) Hasil Belajar

Peserta dapat memahami karakter atau kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan proses pengambilan keputusan di dalam penanggulangan bencana dengan baik.

c) Indikator Hasil Belajar

Peserta dapat:

- 1) Memahami karakter atau kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana
- 2) Memahami proses pengambilan keputusan di dalam penanggulangan bencana

d) Materi Pokok

- 1) Karakter Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana
- 2) Proses Pengambilan Keputusan di dalam Penanggulangan Bencana
- 3) Simulasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan

e) Sumber Belajar (Referensi)

- 1) Bahan Bacaan Pelatihan

f) Jumlah JP: 7 JP (315 menit)

E. Evaluasi

1. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta ditujukan untuk mengenai peningkatan pengetahuan peserta pada materi yang diberikan di dalam pelatihan, yang dilakukan melalui tes tertulis (ujian akhir) dan pengamatan secara langsung (sikap dan keterampilan) oleh tim evaluasi selama kegiatan diklat berlangsung. Adapun kelulusan peserta ditentukan dengan penilaian sebagai berikut:

a) Aspek Sikap dan Perilaku

Indikator yang dinilai dari aspek sikap dan perilaku adalah kehadiran, ketepatan hadir di kelas, serta etika dan sopan santun. Penilaian dari aspek sikap dan perilaku memiliki bobot 10% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus). Pengamatan dan penilaian disiplin menggunakan Formulir 1.

b) Aspek Ketrampilan

Indikator yang dinilai dari aspek ketrampilan adalah kecakapan ketika mengikuti praktek/ simulasi, melaksanakan penugasan, dan keaktifan dalam berdiskusi selama pembelajaran. Penilaian dari aspek ketrampilan memiliki bobot 30% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus). Pengamatan dan penilaian ketrampilan menggunakan Formulir 2.

c) Aspek Penguasaan Materi

Unsur penguasaan materi mencakup bahan ujian tertulis. Indikator penguasaan tersebut adalah angka yang dihasilkan dari jawaban peserta dalam ujian tertulis, yang dilakukan setelah seluruh mata Diklat dalam kurikulum diberikan. Penyelenggaraan ujian akhir dilaksanakan oleh tim evaluator dari Pusdiklat PB BNPB. Penilaian dari aspek Penguasaan materi memiliki bobot 60% dengan penilaian terkecil sebesar 0 (nol) dan nilai tertinggi sebesar 100 (Seratus).

Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut: (a) Lulus Memuaskan (Skor: 90,0-100); (b) Lulus Baik Sekali (Skor: 80,0-89,0); (c) Lulus Baik (Skor: 70,0-79,0); dan (d) Tidak Lulus (Skor: di bawah 70,0). Peserta dinyatakan "TIDAK LULUS" apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai peserta kurang dari 70 dan dinyatakan "GUGUR" apabila ketidakhadiran peserta melebihi 50% dari jumlah jam pelatihan, kecuali yang cacat jasmani. Rekap penilaian peserta untuk menentukan kelulusan peserta menggunakan formulir yang telah disediakan sebelumnya. Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Diklat.

2. Evaluasi Tenaga Pengajar

Evaluasi tenaga pengajar dilakukan oleh peserta dan tim evaluator. Aspek yang dinilai oleh peserta Diklat antara lain:

- Penyampaian substansi, yang terdiri atas: sistematika penyajian, kemampuan menyajikan, cara menjawab pertanyaan dari peserta, kerjasama antar widyaiswara (di dalam tim), dan penggunaan bahasa.

- b) Sikap dan penampilan, yang terdiri atas: ketepatan waktu dan kehadiran, sikap dan perilaku, kerapian berpakaian, dan pemberian motivasi kepada peserta.
- c) Penggunaan fasilitas pendukung:
- d) Penggunaan metode dan sarana diklat;

Evaluasi terhadap pengajar dilakukan oleh peserta, menggunakan formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Penilaian terhadap tenaga pengajar yang dilakukan oleh peserta menggunakan form yang telah disediakan sebelumnya.

3. Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai dalam evaluasi penyelenggaraan meliputi: (1) Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat, (2) Ketersediaan kelengkapan bahan Diklat, (3) Pelayanan terhadap peserta dan tenaga pendidik, (4) Konsumsi memenuhi kebutuhan gizi; (5) Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah, (6) Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, kamar mandi, WC, dan lain-lain, (7) Administrasi Diklat, yang meliputi: sejauh mana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik dan tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file dokumen. Penilaian terhadap penyelenggara diklat dilakukan oleh tenaga pengajar dan peserta dengan menggunakan form yang tersedia. Hasilnya diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara dan tim evaluasi sebagai bahan masukan atau umpan balik untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang.

4. Evaluasi Pasca Diklat

Mekanisme dan prosedur evaluasi pasca diklat adalah sebagai berikut:

- (1) Evaluasi pasca diklat dilakukan antara enam sampai dua belas bulan setelah penyelenggaraan diklat berakhir.
- (2) Evaluasi pasca diklat dilakukan oleh penyelenggara diklat bekerjasama dengan tim evaluator dan atau dengan tim penjamin mutu diklat.

Hasil monitoring dan evaluasi Diklat disampaikan kepada Pusdiklat PB melalui Laporan tertulis dan email Pusdiklat PB: pusdiklat.pb.bnpb@gmail.com, sesuai dengan formulir dan sesuai dengan format laporan monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN PELAKSANAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

A. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD adalah aparatur pemerintah.

B. Karakteristik Calon Peserta Diklat

Persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD:

- 1) Minimal Eselon III atau Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Belum pernah mengikuti atau belum dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD.
- 3) Minimal berpendidikan sarjana atau sederajat
- 4) Surat penugasan dari Pimpinan Daerah.
- 5) Bersedia mengikuti seluruh proses kegiatan diklat.
- 6) Surat Keterangan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat dengan menggunakan Form

C. Karakteristik Tenaga Kediklatan

Tenaga kediklatan pada pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD, adalah:

- 1) Penceramah/ narasumber adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat pada kegiatan diklat.
- 2) Widyaiswara/ pelatih/ instruktur adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai lainnya) dan penguji (evaluasi pemahaman).
- 3) Pengelola dan penyelenggara lembaga Diklat yang terakreditasi yaitu pejabat struktural dan pejabat pelaksana umum yang bertugas pada lembaga Diklat pemerintah terakreditasi.

Persyaratan tenaga kediklatan:

- 1) Berpendidikan minimal S1 atau yang sederajat.
- 2) Penceramah/ narasumber minimal pejabat eselon 2 atau sederajat
- 3) Pengajar/ pelatih/ instruktur telah memiliki sertifikat/ STTPL *Training of Trainer* (TOT) Dasar Manajemen Bencana.
- 4) Pengelola dan penyelenggara lembaga diklat pemerintah terakreditasi memiliki kemampuan dalam mengelola kelas yang dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat/ STTPL diklat *Management of Training* bagi pengelola diklat;
 - b. Sertifikat/ STTPL *Training of Course* bagi penyelenggara diklat;
 - c. Pengelola dan penyelenggara dapat memberdayakan tenaga kediklatan lainnya dengan persyaratan yang sama dan klasifikasi pengajar yang disetujui oleh pimpinan lembaga diklat yang terakreditasi.
- 5) Terampil mengajar secara efektif dan efisien sesuai dengan rancang bangun pembelajaran atau sejenisnya.
 - 6) Mampu menggunakan metode dengan media yang sesuai dengan mata diklat Senior Management Training Penanggulangan Bencana.

D. Karakteristik Penyelenggara

Pengelola dan penyelenggara lembaga Diklat yang terakreditasi yaitu pejabat struktural dan pejabat pelaksana umum yang bertugas pada lembaga diklat pemerintah terakreditasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD menggunakan prasarana sebagai berikut:

- 1) Aula;
- 2) Ruang Kelas;
- 3) Ruang Diskusi;
- 4) Ruang Kantor;
- 5) Ruang Olah Raga;
- 6) Asrama bagi Peserta, Penyelenggara, dan Tenaga Pengajar;
- 7) Perpustakaan;
- 8) Ruang Makan;
- 9) Fasilitas Rekreasi;
- 10) Unit kesehatan;
- 11) Tempat Ibadah.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD menggunakan sarana:

- 1) Modul/ bahan ajar;
- 2) Buku referensi;
- 3) Papan tulis;
- 4) Standing Flipchart;
- 5) Marker;
- 6) *Peralatan Audio Visual*
- 7) Sound system;
- 8) Compact disc dan/atau flash disk;
- 9) *Sound Recorder*;
- 10) Computer/Laptop;
- 11) LCD Projector;
- 12) Jaringan Wireless fidelity (Wi-Fi);

Lampiran 1. Silabus Kurikulum Diklat Kepemimpinan dalam Penaanggulangan Bencana bagi Kalaksa BPBD

No	Mata Diklat	Tujuan	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran
I PEMAHAMAN PENANGGULANGAN BENCANA						
1	Kebencanaan	Peserta dapat memahami konsep, jenis dan karakteristik bencana dengan benar.	1) Menjelaskan konsep bencana. 2) Membedakan jenis-jenis bencana. 3) Menjelaskan karakteristik bencana. 4) Menjelaskan lingkup manajemen penanggulangan bencana	1. Konsep Bencana 2. Karakteristik Bencana	1a. Konsep bencana. 1b. Jenis-jenis bencana. 2a. Karakteristik bencana. 2b. Lingkup manajemen penanggulangan bencana.	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video
2	Program dan Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana	Peserta dapat memahami dan menyusun program dan kebijakan pengurangan risiko bencana dengan baik.	1) Menjelaskan manajemen risiko bencana. 2) Menjelaskan manajemen kesiapsiagaan. 3) Memahami dan menyusun program dan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana.	1. Manajemen Risiko dan Kesiapsiagaan Bencana 2. Program dan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana	1a. Manajemen risiko bencana 1b. Kesiapsiagaan 2a. Penyusunan program dan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video
3	Penanganan Darurat Bencana	Peserta dapat memahami manajemen tanggap darurat bencana dan SKPDB dengan baik.	1) Menjelaskan manajemen darurat bencana. 2) Menjelaskan lingkup dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam masa tanggap darurat bencana 3) Menjelaskan tahapan,	1. Manajemen Darurat Bencana 2. Mekanisme Penanganan Darurat Bencana	1a. Alur Proses PD 1b. Upaya PD 1c. Pembiayaan 2a. Penetapan status 2b. Aktivasi 2c. Struktur Komando Darurat	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video

No	Mata Diklat	Tujuan	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran
			struktur dan operasionalisasi SKPDB dalam penanganan tanggap darurat bencana.			
4	Strategi dan Implementasi Pemulihan Pasca Bencana	Peserta dapat memahami dan menyusun strategi dan implementasi pasca bencana dengan baik.	1) Menjelaskan manajemen pemulihan bencana. 2) Memahami konsepsi dasar mengenai kajian kebutuhan pasca bencana 3) Memahami menjelaskan dan menyusun strategi dan implementasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Manajemen Pemulihan Bencana 2. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana 3. Strategi dan implementasi kegiatan Pasca Bencana	1a. Pengertian, lingkup dan tahapan manajemen pemulihan bencana 1b. Pelaksanaan manajemen pemulihan bencana 2a. Pengertian, lingkup dan tahapan kajian kebutuhan pasca bencana 2b. Metode kajian kebutuhan pasca bencana 3a. Penyusunan strategi dan implementasi kegiatan pasca bencana	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video
5	Sistem Logistik dan Peralatan Nasional	Peserta dapat memahami manajemen dan sistem logistik dan peralatan dengan baik.	1) Menjelaskan manajemen logistik. 2) Menjelaskan manajemen peralatan. 3) Memahami sistem logistik bencana nasional	1. Manajemen Logistik 2. Manajemen Peralatan 3. Sistem logistik nasional	1a. Pengertian dan lingkup manajemen logistik 2a. Pengertian dan lingkup manajemen peralatan 3a. Implementasi sistem logistik nasional	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video
II	PENINGKATAN KEMAMPUAN STRATEGIS					
1	Sistem Nasional	Peserta dapat	1) Memahami sistem	1. Kerangka regulasi	1a. Legislasi yang berlaku	Ceramah

No	Mata Diklat	Tujuan	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran
	Penanggulangan Bencana	memahami sistem nasional dan kerangka regulasi yang berlaku, serta kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana dengan baik.	nasional dan kerangka regulasi yang berlaku saat ini dalam penanggulangan bencana 2) Memahami kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana.	dan kebijakan, 2. Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana	1b. Kewenangan yang diberikan oleh legislasi 2a. Perencanaan 2b. Kelembagaan 2c. Pendanaan	Diskusi kelompok Curah gagasan Video
2	Penanggulangan Bencana sebagai Prioritas Pembangunan	Peserta dapat memahami agenda global terkait dengan penanggulangan bencana, cara-cara memadukan dan mengimplementasikan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dengan baik.	1) Memahami penanggulangan bencana dan pemenuhan agenda global 2) Memahami pemaduan rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional 3) Memahami implementasi rencana penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Penanggulangan Bencana dan Pemenuhan Agenda Global 2. Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional	1a. Agenda global yang berhubungan dengan kebencanaan 1b. Strategi pemenuhan agenda global melalui program penanggulangan bencana 2a. Hirarki perencanaan pembangunan nasional 2b. Strategi pemaduan rencana penanggulangan bencana 2c. Implementasi Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video
3	Koordinasi pada Periode Tanggap Darurat	Peserta dapat memahami dan melakukan koordinasi, komando dan pelaksana dalam	1) Memahami pentingnya koordinasi, komando dan pelaksana dalam tanggap darurat 2) Memahami sistem	1) Koordinasi, Komando dan Pelaksana	1a. Pengertian dan lingkup koordinasi 1a. Pengertian dan lingkup komando 1a. Pengertian dan	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video

No	Mata Diklat	Tujuan	Indikator Hasil Belajar	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Metode Pembelajaran
		tanggap darurat, serta sistem komando penanganan darurat bencana dengan baik.	komando penanganan darurat bencana	2) Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	lingkup pelaksanaan 2a. Tahapan pra dan pelaksanaan SKPDB 2b. Kemudahan akses pada saat pelaksanaan SKPDB	
III	PENINGKATAN KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN					
1	Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana	Peserta dapat memahami karakter atau kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan proses pengambilan keputusan di dalam penanggulangan bencana dengan baik.	1) Memahami karakter atau kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana 2) Memahami proses pengambilan keputusan di dalam penanggulangan bencana 3) Mempraktekkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan	1. Karakteristik Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana 2. Proses Pengambilan Keputusan di dalam Penanggulangan Bencana 3. Simulasi Kepemimpinan dan Pengambil Keputusan	1a. Tipe dan karakter kepemimpinan 1b. Tujuan Kepemimpinan dalam bencana 2a. Pengambilan keputusan dalam bencana 2b. Perbedaan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam bencana dan keadaan normal 3a. Simulasi dan praktek kepemimpinan dalam bencana 3b. Simulasi dan praktek pengambilan keputusan dalam bencana	Ceramah Diskusi kelompok Curah gagasan Video Simulasi Bermain peran Permainan <i>Table top exercise/</i> <i>Command post exercise</i>